

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

BPTU HPT SIBORONGBORONG
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTU HPT SIBORONGBORONG adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTU HPT SIBORONGBORONG mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTU HPT SIBORONGBORONG. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Siborongborong, 31 Desember 2019
Kepala Balai,

drh. I G N A Wisnu Adi Saputra, M.Si
NIP. 197507162002121002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.5.4. Belanja Modal Lainnya

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.4. Persediaan

C.1.5. Persediaan yang Belum Diregister

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTU HPT SIBORONGBORONG yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Siborongborong, 31 Desember 2019
Kepala Balai,

drh. I G N A Wisnu Adi Saputra, M.Si
NIP. 197507162002121002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTU HPT SIBORONGBORONG Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp888.418.723,00 atau mencapai 115,09% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp771.947.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp15.143.637.980,00 atau mencapai 95,11% dari alokasi anggaran sebesar Rp15.922.431.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp 310.950.286.028,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 3.848.243.623,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 307.083.680.857,00; Utang pada pihak ketiga sebesar Rp 16.377.962,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp310.966.663.990

Nilai Ekuitas masing-masing sebesar Rp 310.950.286.028,00

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.026.650.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 0,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp0,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp469.066.560,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-15.651.094.082,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp317.918.708.744,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-15.651.094.082,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-5.572.547.891,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.255.219.257,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp310.950.286.028,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTU HPT SIBORONGBORONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	771.947.000,00	888.418.723,00	115,09	767.384.782,00
Jumlah Pendapatan		771.947.000,00	888.418.723,00	115,09	767.384.782,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	5.611.728.000,00	5.607.324.750,00	99,92	5.323.749.487,00
Belanja Barang	B.4.	9.614.076.000,00	8.881.078.830,00	92,38	7.222.807.015,00
Belanja Modal	B.5.	696.627.000,00	655.234.400,00	94,06	3.408.058.000,00
Jumlah Belanja		15.922.431.000,00	15.143.637.980,00	95,11	15.954.614.502,00

II. NERACA

BPTU HPT SIBORONGBORONG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	497.200.000,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	-2.486.000,00	0,00
Piutang Bukan Pajak (Neto)	C.1.3.	494.714.000,00	1.931.750.000,00
Persediaan	C.1.4.	3.353.529.623,00	11.800.000,00
Jumlah Aset Lancar		3.848.243.623,00	2.057.306.400,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	275.289.269.000,00	275.289.269.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	11.008.094.873,00	10.395.860.473,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	21.721.635.000,00	28.628.467.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	8.641.396.500,00	6.834.149.500,00
Akumulasi Penyusutan	C.2.5.	-9.878.109.516,00	-6.298.189.717,00
Jumlah Aset Tetap		307.083.680.857,00	316.824.503.256,00
Aset Lainnya			
Aset lain-lain	C.3.1.	83.200.000,00	83.200.000,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-48,460,490,00	-46,372,510,00
Jumlah Aset Lainnya		34,739,510,00	36,827,490,00
Jumlah Aset		310,996,663,990,00	317,927,112,660,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	16,377,962,00	8,403,916,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16,377,962,00	8,403,916,00
Jumlah Kewajiban		16,377,962,00	8,403,916,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	310,950,286,028,00	317,918,708,744,00
Jumlah Ekuitas		310,950,286,028,00	317,918,708,744,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		310,950,286,028,00	317,918,708,744,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPTU HPT SIBORONGBORONG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	802.604.555,00	767.384.667,00
JUMLAH PENDAPATAN		802.604.555,00	767.384.667,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	5.607.324.750,00	5.323.749.487,00
Beban Persediaan	D.3.	3.309.103.169,00	47.430.000,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.750.467.996,00	5.456.513.220,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	689.095.690,00	755.325.500,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.618.227.280,00	951.738.295,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	120.800.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2.825.260.312,00	1.845.814.751,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	2.486.000,00	0,00
JUMLAH BEBAN		16.922.765.197,00	14.380.571.253,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-16.120.160.642,00	-13.613.186.586,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	3.026.650.000,00	1.877.679.000,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	3.626.909.460,00	1.976.741.615,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	131.192.900,00	162.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		469.066.560,00	-62.937.385,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-15.651.094.082,00	-13.676.123.971,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTU HPT SIBORONGBORONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	317.918.708.744,00	199.069.659.784,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-15.651.094.082,00	-14.525.468.463,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-5.572.547.891,00	118.187.287.723,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1.	654.494.400,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	-7.033.195.574,00	115.131.722.298,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	806.153.283,00	3.055.565.425,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	14.255.219.257,00	15.187.229.720,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	310.950.286.028,00	317.918.708.744,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTU HPT SIBORONGBORONG

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong adalah melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak.

Sedangkan untuk melaksanakan Tugas Pokok, Balai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul.
- c. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul.
- d. Pelaksanaan pencatatan (recording) pembibitan babi dan kerbau unggul.
- e. Pelaksanaan pelestarian flasma nutfah.
- f. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul.
- g. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul.
- h. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan.
- i. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak.
- j. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak.
- k. Pemberian informasi, dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak.
- l. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul.
- m. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul.
- n. Pemberian pelayanan teknis pemuliaan dan produksi bibit ternak unggul.
- o. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis.
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTUHPT.

Jenis ternak yang dipelihara / dikembangkan meliputi ternak babi yang terdiri dari empat breed yaitu: Yorkshire, Landrace, Berkshire dan Duroc berlokasi di Instalasi Ternak Babi Bahal Batu, serta ternak kerbau yang terdiri dari kerbau Lumpur dan kerbau Sungai. Kerbau Lumpur dipelihara/dikembangkan di Instalasi Ternak Kerbau Bahal Batu dan Instalasi Ternak Kerbau Rondaman Palas-Padang Lawas Utara sedangkan ternak kerbau Sungai dipelihara di Instalasi Ternak Kerbau Silangit.

Disamping berfungsi untuk menghasilkan ternak unggul babi dan kerbau, BPTUHPT Siborongborong juga berperan sebagai wadah ilmu pengetahuan dan informasi terapan di lapangan yang berguna untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik bagi masyarakat petani, peternak, kelompok tani, instansi pemerintah maupun bagi mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan cara Praktek Kerja Lapangan (PKL), studi banding, magang, pelatihan dan bimbingan Teknis.

Kegiatan tersebut terus dilakukan setiap tahun sebagai realisasi dari Visi dan Misi BPTUHPT yaitu Visi : "***Tersedianya bibit ternak babi dan kerbau berkualitas serta benih/bibit hijauan pakan ternak dalam jumlah yang cukup serta terjamin kontinuitasnya.*** ", dan untuk mewujudkan visi tersebut BPTUHPT Siborongborong mengemban Misi sebagai berikut :

- a. ***Melaksanakan proses pemuliaan ternak melalui seleksi, perkawinan dan pencatatan yang ketat secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya genetik ternak secara optimal.***
- b. ***Melaksanakan bimbingan teknis dan jasa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk pengembangan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak.***
- c. ***Melakukan distribusi ternak Babi dan Kerbau unggul bersertifikat serta hijauan pakan ternak.***

2. Aspek Strategis BPTUHPT Siborongborong

Kultur atau budaya dan kebutuhan akan Ternak Kerbau dan Ternak Babi dalam masyarakat Tapanuli Raya yang masih bergantung terhadap komoditi ternak yang ada di BPTUHPT Siborongborong merupakan salah satu aspek strategis.

3. Kendala Utama BPTUHPT Siborongborong

Kendala Utama BPTUHPT dalam menjalankan kinerja selama TA. 2019 adalah belum maksimalnya produksi ternak babi baik dari segi populasi, kelahiran ternak babi hingga produksi bibit ternak.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTU HPT SIBORONGBORONG. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTU HPT SIBORONGBORONG menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTU HPT SIBORONGBORONG dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTU HPT SIBORONGBORONG yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTU HPT SIBORONGBORONG adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTU HPT SIBORONGBORONG telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	771.947.000,00	771.947.000,00
Jumlah Pendapatan	771.947.000,00	771.947.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.334.095.000,00	5.524.848.000,00
Belanja Lembur	86.880.000,00	86.880.000,00
Belanja Barang Operasional	353.184.000,00	573.560.000,00
Belanja Barang Non Operasional	8.993.239.000,00	2.499.490.000,00
Belanja Barang Persediaan	174.551.000,00	3.654.958.000,00
Belanja Jasa	439.000.000,00	472.260.000,00
Belanja Pemeliharaan	697.426.000,00	744.915.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.451.597.000,00	1.668.893.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	14.329.500.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	406.642.000,00	607.141.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	174.666.000,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	195.000.000,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	212.000.000,00	89.486.000,00
Jumlah Belanja	32.847.780.000,00	15.922.431.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp888.418.723,00 atau mencapai 115,09% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp771.947.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019
--------	------

Akun Pendapatan	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0,00	85.814.168,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	771.947.000,00	802.111.160,00	103,91
Pendapatan Denda	0,00	493.395,00	0,00
Jumlah	771.947.000,00	888.418.723,00	115,09

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,77% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTU HPT SIBORONGBORONG adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	85.814.168,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	802.111.160,00	762.168.392,00	5,24
Pendapatan Denda	493.395,00	5.216.275,00	-90,54
Pendapatan Lain-lain	0,00	115,00	-100,00
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	888.418.723,00	767.384.782,00	15,77

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp15.143.637.980,00 atau 95,11% dari anggaran belanja sebesar Rp15.922.431.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	5.611.728.000,00	5.607.702.329,00	99,93

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Barang	9.614.076.000,00	8.881.078.830,00	92,38
Belanja Modal	696.627.000,00	655.234.400,00	94,06
Total Belanja Kotor	15.922.431.000,00	15.144.015.559,00	95,11
Pengembalian Belanja		-377.579,00	0.00
Total Belanja	15.922.431.000,00	15.143.637.980,00	95,11

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -5,08% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Sesuai pagu anggaran

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	5.607.324.750,00	5.323.749.487,00	5,33
Belanja Barang	8.881.078.830,00	7.222.807.015,00	22,96
Belanja Modal	655.234.400,00	3.408.058.000,00	-80,77
Total Belanja	15.143.637.980,00	15.954.614.502,00	-5,08

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.607.324.750,00 dan Rp5.323.749.487,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,33% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Bertambahnya CPNS

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
--------	----------------------------	----------------------------	----------------

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.520.843.329,00	5.294.467.600,00	4,28
Belanja Lembur	86.859.000,00	33.230.000,00	161,39
Jumlah Belanja Kotor	5.607.702.329,00	5.327.697.600,00	5,26
Pengembalian Belanja Pegawai	-377.579,00	-3.948.113,00	-90,44
Jumlah Belanja	5.607.324.750,00	5.323.749.487,00	5,33

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.881.078.830,00 dan Rp7.222.807.015,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 22,96% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena pagu anggaran turun dari tahun sebelumnya

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	524.617.600,00	507.097.100,00	3,46
Belanja Barang Non Operasional	2.314.200.500,00	4.719.053.800,00	-50,96
Belanja Barang Persediaan	3.341.701.950,00	59.230.000,00	5.541,91
Belanja Jasa	400.875.850,00	230.362.320,00	74,02
Belanja Pemeliharaan	681.455.650,00	755.325.500,00	-9,78
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.618.227.280,00	965.763.295,00	67,56
Jumlah Belanja Kotor	8.881.078.830,00	7.236.832.015,00	22,72
Pengembalian Belanja Barang	0,00	-14.025.000,00	-100,00
Jumlah Belanja	8.881.078.830,00	7.222.807.015,00	22,96

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp655.234.400,00 dan Rp3.408.058.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -80,77% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Karena pagu anggaran tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	565.910.900,00	347.592.000,00	62,81
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	499.900.000,00	-100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	2.550.596.000,00	-100,00
Belanja Modal Lainnya	89.323.500,00	9.970.000,00	795,92
Jumlah Belanja Kotor	655.234.400,00	3.408.058.000,00	-80,77
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	655.234.400,00	3.408.058.000,00	-80,77

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp565.910.900,00 dan Rp347.592.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 62,81% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Berkurangnya untuk pengadaan peralatan dan mesin berkurang

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	565.910.900,00	347.592.000,00	62,81
Jumlah Belanja Kotor	565.910.900,00	347.592.000,00	62,81
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	565.910.900,00	347.592.000,00	62,81

B.5.4. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp89.323.500,00 dan Rp9.970.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 795,92% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Belanja barang operasional lainnya

Perbandingan Belanja Modal Lainnya

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	89.323.500,00	9.970.000,00	795,92
Jumlah Belanja Kotor	89.323.500,00	9.970.000,00	795,92
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	89.323.500,00	9.970.000,00	795,92

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp113.756.400,00 dan Rp113.756.400,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019
0 (Nol)	0,00
Jumlah	0,00

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp497.200.000,00 dan Rp0,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang Lainnya	497.200.000,00	0,00
Jumlah	497.200.000,00	0,00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-2.486.000,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang

masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.219.161.133,00 dan Rp1.931.750.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	41.421.210,00	0,00
Bahan Baku	32.839.923,00	0,00
Persediaan Lainnya	2.144.900.000,00	1.931.750.000,00
Jumlah	2.219.161.133,00	1.931.750.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTU HPT SIBORONGBORONG per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp275.289.269.000,00 dan Rp275.289.269.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTU HPT SIBORONGBORONG per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.008.094.873,00 dan Rp10.395.860.473,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	10.395.860.473,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	522.910.900,00
Pengembangan Nilai Aset	89.323.500,00
Saldo per 31 Desember 2019	11.008.094.873,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-5.955.725.462,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	5.052.369.411,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

C.2.4. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTU HPT SIBORONGBORONG per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp21.721.635.000,00 dan Rp28.628.467.000,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	28.628.467.000,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	1.039.240.825,00
Pengembangan Nilai Aset	43.000.000,00
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	749.480.988,00
Koreksi Penilaian Kembali BMN	1.026.063.589,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-6.874.123.000,00
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	-449.222.414,00
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	-1.039.240.825,00
Saldo per 31 Desember 2019	21.721.635.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-813.477.440,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	20.908.157.560,00

C.2.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTU HPT SIBORONGBORONG per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.051.044.500,00 dan Rp6.834.149.500,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6.834.149.500,00
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	199.140.000,00
Koreksi Kesalahan input IP	216.895.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-199.140.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	7.051.044.500,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-32.542.468,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	7.018.502.032,00

C.2.8. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTU HPT SIBORONGBORONG per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.970.000,00 dan Rp9.970.000,00.

C.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPTU HPT SIBORONGBORONG per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp518.473.600,00 dan Rp518.473.600,00. yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTU HPT SIBORONGBORONG per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-7.960.972.940,00 dan Rp-6.298.189.717,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	11.008.094.873,00	-5.955.725.462,00	5.052.369.411,00
2.	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	65.825.000,00	0,00	65.825.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	21.721.635.000,00	-813.477.440,00	20.908.157.560,00
4.	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	300.800.000,00	0,00	300.800.000,00
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.051.044.500,00	-32.542.468,00	7.018.502.032,00
6.	Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	1.079.878.400,00	0,00	1.079.878.400,00
7.	Aset Tetap Lainnya	9.970.000,00	0,00	9.970.000,00
Akumulasi Penyusutan		41.237.247.773,00	-7.960.972.940,00	33.276.274.833,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTU HPT SIBORONGBORONG per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-2.087.980,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Akumulasi Penyusutan		0,00	-2.087.980,00	-2.087.980,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.974.046,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada BPTU HPT SIBORONGBORONG per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	7.974.046,00	0,00
Jumlah	7.974.046,00	0,00

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp310.950.286.028,00 dan Rp317.918.708.744,00,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp802.604.555,00 dan Rp767.384.667,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	493.395,00	5.216.275,00	-90,54
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	796.800.000,00	756.800.000,00	5,29
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.311.160,00	5.368.392,00	-1,07
Jumlah	802.604.555,00	767.384.667,00	4,59

<silahkan diberikan penjelasan atas uraian pendapatan yang tersaji pada tabel diatas>.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.607.324.750,00 dan Rp5.323.749.487,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.852.328.100,00	3.698.567.860,00	4,16
Beban Pembulatan Gaji PNS	56.722,00	54.184,00	4,68
Beban Tunj. Anak PNS	92.874.138,00	89.901.159,00	3,31
Beban Tunj. Beras PNS	209.366.220,00	211.611.240,00	-1,06

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Fungsional PNS	224.910.000,00	218.367.600,00	3,00
Beban Tunj. PPh PNS	2.410.426,00	1.851.736,00	30,17
Beban Tunj. Struktural PNS	48.860.000,00	47.880.000,00	2,05
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	287.368.244,00	274.309.158,00	4,76
Beban Tunjangan Umum PNS	113.168.000,00	113.140.000,00	0,02
Beban Uang Lembur	86.859.000,00	33.230.000,00	161,39
Beban Uang Makan PNS	689.123.900,00	634.836.550,00	8,55
Jumlah	5.607.324.750,00	5.323.749.487,00	5,33

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.309.103.169,00 dan Rp47.430.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	324.245.742,00	0,00	0,00
Beban Persediaan konsumsi	2.743.745.270,00	47.430.000,00	5.684,83
Beban persediaan lainnya	241.112.157,00	0,00	0,00
Jumlah	3.309.103.169,00	47.430.000,00	6.876,81

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.750.467.996,00 dan Rp5.456.513.220,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	174.249.000,00	3.012.240.300,00	-94,22
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.617.986.500,00	1.660.363.500,00	-2,55
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	147.698.500,00	-100,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	423.956.000,00	244.320.000,00	73,52
Beban Honor Output Kegiatan	34.760.000,00	46.450.000,00	-25,17
Beban Jasa Konsultan	0,00	15.650.000,00	-100,00
Beban Jasa Lainnya	152.625.000,00	59.965.000,00	154,52
Beban Jasa Profesi	124.900.000,00	44.460.000,00	180,93
Beban Keperluan Perkantoran	90.790.000,00	107.060.000,00	-15,20
Beban Langganan Listrik	109.328.496,00	93.850.940,00	16,49
Beban Langganan Telepon	12.001.400,00	16.436.380,00	-26,98
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.871.600,00	8.018.600,00	23,11
Jumlah	2.750.467.996,00	5.456.513.220,00	-49,59

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp689.095.690,00 dan Rp755.325.500,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	387.179.000,00	342.891.600,00	12,92
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	100.247.400,00	-100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	294.276.650,00	312.186.500,00	-5,74
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	255.000,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan suku cadang	7.385.040,00	0,00	0,00
Jumlah	689.095.690,00	755.325.500,00	-8,77

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.618.227.280,00 dan Rp951.738.295,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.390.100.380,00	820.076.795,00	69,51
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.584.800,00	32.365.000,00	-11,68
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	47.646.100,00	23.685.000,00	101,17
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	151.896.000,00	75.611.500,00	100,89
Jumlah	1.618.227.280,00	951.738.295,00	70,03

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp120.800.000,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	120.800.000,00	0,00	0,00
Jumlah	120.800.000,00	0,00	0,00

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.825.260.312,00 dan Rp1.845.814.751,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	793.984.506,00	805.983.370,00	-1,49
Beban Penyusutan Irigasi	70.269.386,00	23.357.590,00	200,84
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	715.263.499,00	332.149.411,00	115,34
Beban Penyusutan Jaringan	16.271.234,00	8.135.617,00	100,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.087.980,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.227.383.707,00	676.188.763,00	81,52
Jumlah	2.825.260.312,00	1.845.814.751,00	53,06

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.486.000,00 dan Rp0,00.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNBP	2.486.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.486.000,00	0,00	0,00

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-3.026.650.000,00	-1.877.679.000,00	61,19
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-131.192.900,00	-162.000.000,00	-19,02
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	85.814.168,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	188.495.292,00	101.250.000,00	86,17
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	3.352.600.000,00	1.875.491.500,00	78,76
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	115,00	-100,00
Jumlah	469.066.560,00	-62.937.385,00	-845,29

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp318.768.053.256,00 dan Rp199.069.659.784,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-15.651.094.082,00 dan Rp-13.676.123.971,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-5.572.547.891,00 dan Rp118.187.287.723,00.

E.3.1. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp654.494.400,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi reklasifikasi nilai persediaan, aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-7.033.195.574,00 dan Rp115.131.722.298,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Gedung dan Bangunan	-6.949.832.000,00
Jalan dan Jembatan	6.783.000,00
Irigasi	210.112.000,00
Jumlah	-7.033.195.574,00

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp806.153.283,00 dan Rp3.055.565.425,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	620.660.762,00
Akumulasi Penyusutan Irigasi	-23.754.205,00
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	209.246.726,00
Jalan dan Jembatan	0,00
Jumlah	806.153.283,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.255.219.257,00 dan Rp15.187.229.720,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.143.637.980,00
Diterima dari Entitas Lain	-888.418.723,00
Jumlah	14.255.219.257,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-888.418.723,00 sedangkan DKEL sebesar Rp15.143.637.980,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp310.950.286.028,00 dan Rp317.918.708.744,00.